



RINGKASAN HASIL PENELITIAN

Pembangunan pariwisata merupakan sektor ekonomi yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Penduduk lokal merupakan pemangku kepentingan utama dalam proses pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata yang harus dilibatkan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pembangunan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kebijakan dan komunikasi pariwisata dalam upaya pembangunan daerah wisata belum melibatkan masyarakat setempat secara maksimal, terutama pembinaan kelompok sadar wisata dan pengembangan produk serta ciri khas daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah berupaya untuk memahami model komunikasi pariwisata dalam pembangunan masyarakat pesisir di daerah Kabupaten Bengkalis.

Tujuan penelitian tersebut akan diungkap dengan menggunakan teori-teori komunikasi pariwisata, komunikasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pendekatan perencanaan dan manajemen komunikasi pariwisata digunakan sebagai upaya untuk memahami perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan komunikasi pembangunan pariwisata di kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap stakeholder yang terlibat, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pariwisata dan komunikasinya di Kabupaten Bengkalis secara strategis dibuat oleh pemerintah daerah, bersinergi dengan pemerintah Provinsi Riau dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah Bengkalis diberikan kewenangan luas untuk mengembangkan. Kebijakan pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) masih belum mampu menggerakkan kegiatan pariwisata masyarakat. Kegiatan komunikasi pariwisata masih belum direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara maksimal.

Langkah dan program komunikasi pariwisata dilakukan dengan cara memberi pelatihan kepada kelompok sadar wisata, membentuk desa wisata, mengikuti pameran, dan promosi lainnya. Namun kegiatan komunikasi ke masyarakat malah masih belum dapat menggerakkan masyarakat untuk sadar wisata dan terlibat aktif dalam kegiatan pariwisata dalam mendukung kebijakan pemerintah. Pembangunan destinasi wisata belum didukung dengan infrastruktur yang memadai, serta manajemen komunikasi pariwisata tidak terintegrasi dengan menggunakan konsep pemasaran dan perkembangan teknologi melalui pembentukan destinasi wisata yang smart. Pemerintah sudah seharusnya mengevaluasi kebijakan komunikasi pariwisata secara rutin tidak hanya dalam internal dinas pemerintah, namun dilakukan pada setiap komponen yang terlibat di dalamnya, termasuk komponen komunikasinya. Pembangunan komunikasi pariwisata semesetinya ditunjang dengan pembangunan infrastruktur, karena pembangunan jalan penting untuk mewujudkan destinasi wisata yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.